

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Bank Muamalat Indonesia

Awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dengan memulai kegiatannya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Sejarah awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan sejarah awal berdirinya bank syariah di Indonesia karena, Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Perkembangan bank syariah di berbagai negara Islam berpengaruh di Indonesia, dan para tokoh Islam mulai berfikir dan melakukan diskusi mengenai bank syariah sebagai pilihan perekonomian. Dengan dukungan yang nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyaingi predikat dengan bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90 Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung pada kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencatat bahwatitik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development*

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadikansalah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dan dalam kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesiapun berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang pada kepemimpinan yang kokoh, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Bank Muamalat Indonesia memiliki produk share-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya seluruh merchant berlogo visa. Sebagai bank pertama murni syariah, Bank Muamalat Indonesiaakan berkomitmen dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, dan juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media masa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bankin Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institutionin Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi dari Bank Muamalat Indonesia sendiri adalah “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*” misi Bank Muamalat Indonesia adalah “ membangun Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Perhitungan Variabel

a. Variabel Dependen

1. NPF (*Net Performing Financing*) (Y)

Pembiayaan bermasalah merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank (Hamzah, 2018). Pada bank syariah, semakin besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur (Ardana, 2017). Berikut adalah hasil NPF *netto* bank yang di jadikan sampel

Tabel 4.1

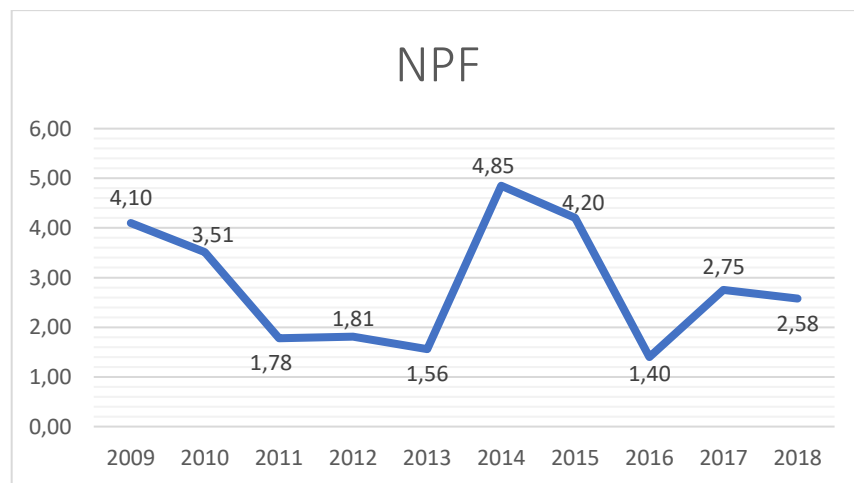
NPF (*Non performing Financing*)

Kode	Tahun	NPF <i>netto</i>
Bank muamalat	2009	4,10
	2010	3,51
	2011	1,78
	2012	1,81
	2013	1,56
	2014	4,85
	2015	4,20
	2016	1,40
	2017	2,75
	2018	2,58

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas tingkat pembiayaan bermasalah pada NPF *netto* Bank Muamalat Indonesia yang tertinggi pada tahun 2014 mencapai 4,85% dan pada tahun 2016 NPF *netto* mengalami penurunan mencapai 1,40%. Bank dikatakan mengalami kegagalan pembiayaan ketika mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah, sampai melebihi angka 5%. Ketika rasio NPF rendah, maka tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi berarti semakin baik kondisi bank tersebut. NPF juga merupakan indikator dalam menilai kinerja bank, dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan pada bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank (Aryani, 2016).

Grafik 4.1
NPF (Net Performing Financing)
Bank Muamalat Indonesia



Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan dari Grafik 4.1 di atas tingkat pembiayaan bermasalah pada NPF *netto* Bank Muamalat Indonesia berada sejak 2009 mengalami kenaikan sampai 4,10% dan menunjukkan tren kenaikan lagi pada tahun di 2014 NPF *netto* mencapai 4,85%. Angka tersebut sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena mengingat peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank

Indonesia menetapkan ukuran maksimal tingkat rasio pembiayaan bermasalah adalah 5% (peraturan BI No. 17/II/PBI/2015). NPF yang tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah dan memunculkan kekhawatiran dana yang disimpannya tidak akan kembali (Hamzah, 2018).

b. Variabel Independen

1. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) (X1)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Rohawati, 2012).

Tabel 4.2

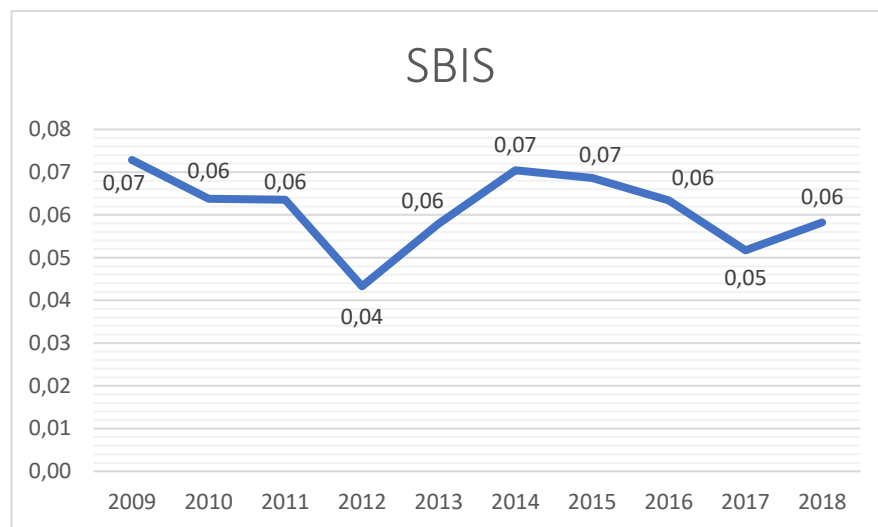
SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)

Tahun	SBIS
2009	0,07
2010	0,06
2011	0,06
2012	0,04
2013	0,06
2014	0,07
2015	0,07
2016	0,06
2017	0,05
2018	0,06

Sumber:bi.go.id

Berdasarkan tabel di atas 4.2 menunjukkan nilai SBIS mengalami peningkatan jatuh pada tahun 2009. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat bonus SBIS, maka bank syariah akan lebih cenderung untuk menaruh dananya di produk tersebut dibandingkan dengan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, SBIS merupakan salah satu instrumen investasi bagi bank yang aman dan tidak ada risiko.

Grafik 4.2
SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah)



Sumber : Data diolah, 2020.

Berdasarkan grafik 4.2 pada SBIS mengalami kenaikan pada 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 mencapai 0,04. Lalu sampai tahun 2013 terus mengalami kenaikan SBIS akan berpengaruh pada peningkatan NPF bank syariah. Penempatan dana pada SBIS mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit karena dana yang disalurkan kembali kepada nasabah menjadi berkurang. SBIS merupakan salah satu perangkat dalam perbankan syariah dalam menempatkan dananya yang dalam kondisi over likuiditas sehingga bank yang mengalami akan kesulitan likuiditas dapat terbantu.

2. Inflasi (X2)

Inflasi adalah sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dan menggambarkan perubahan - perubahan harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Dalam keadaan negara mengalami inflasi maka harga-harga barang akan menjadi naik. Kenaikan harga barang ini akan mempengaruhi nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan dari bank, karena dana yang seharusnya digunakan untuk mengangsur digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang harganya meningkat (Hamzah, 2018).

Tabel 4.3
Inflasi

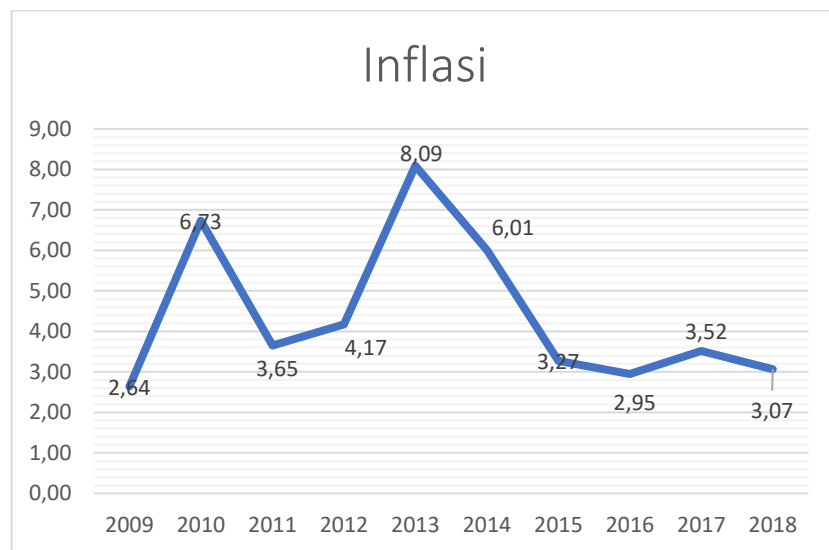
Tahun	Inflasi
2009	2,64
2010	6,73
2011	3,65
2012	4,17
2013	8,09
2014	6,01
2015	3,27
2016	2,95
2017	3,52
2018	3,07

Sumber: BPS.

Berdasarkan dari tabel 4.3 di atas tingkat inflasi tertinggi didapat pada tahun 2013 mencapai 8,09% . Laju inflasi tahunan yang ideal bagi Indonesia untuk jangka menengah dan panjang sebesar 3%. Level tersebut telah mempertimbangkan struktur perekonomian saat ini serta tren nilai tukar rupiah dan suku bunga. Dimana hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menaikkan harga. Kenaikan harga akan mengurangi daya beli masyarakat yang berdampak

pada berkurang pendapatan yang diperoleh oleh produsen. Pendapatan rendah akan membuat pengembalian atas pembiayaan dari bank menjadi tidak lancar, sehingga dapat menimbulkan semakin besarnya risiko pembiayaan yang ditanggung bank (Purnamasari, 2016).

Grafik 4.3
Inflasi



Sumber: Data diolah,2020.

Berdasarkan dari grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat Inflasi yang tertinggi pada tahun 2013 mencapai 8,09%. Ketika harga meningkat, pengeluaran masyarakat akan lebih besar dibandingkan keadaan normal (Auliani & Syaichu, 2016) dan pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 2,95% hal ini sesuai dengan target laju inflasi tahunan yang ideal bagi Indonesia sebesar 3%. Karena itu pengeluaran yang akan meningkat akan berbanding terbalik kepada kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah.

3. NIM (*NetIncomeMargin*)

NIM merupakan ratio yang akan digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal terutama dalam hal pengelolaan aktiva produktif dana akan menghasilkan laba bersih. NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank. *Net Income Margin* (NIM) yaitu suatu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih, pendapatan bunga bersih.

Tabel 4.4
NIM

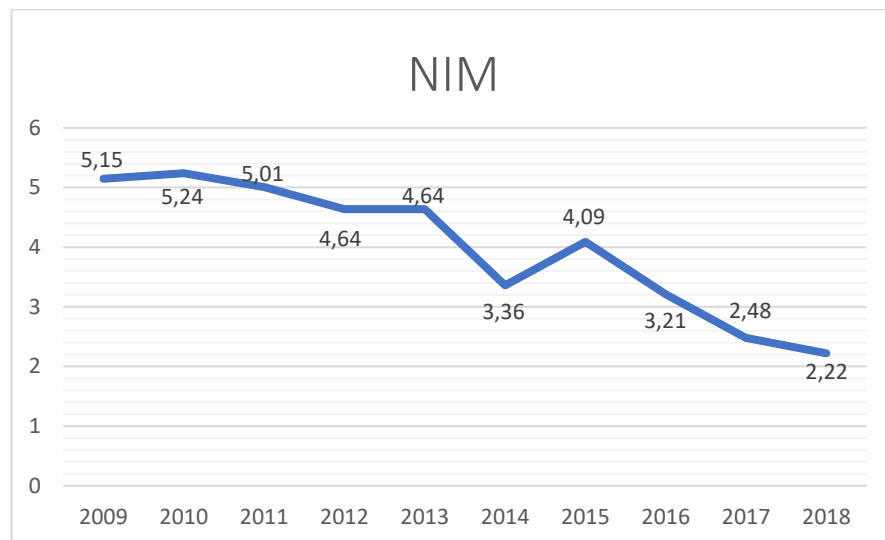
Kode	Tahun	<i>Net incomemargin</i> (NIM)
Bank muamalat	2009	5,51
	2010	5,24
	2011	5,01
	2012	4,64
	2013	4,64
	2014	3,36
	2015	4,09
	2016	3,21
	2017	2,48
	2018	2,22

Sumber:Data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai tertinggi NIM Bank Muamalat Indonesia didapatkan pada tahun 2009 sebesar 5,51% dan untuk nilai terendah NIM berada pada tahun 2018 mencapai sebesar 2,22%. Berdasarkan ketentuan pada peraturan BI No.5/2003, salah satu proxy dari

risiko pasar adalah suku bunga. NIM mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa NIM menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan ditempatkan dalam bentuk pembiayaan. NIM yang besar bagus untuk pertumbuhan perbankan namun hal ini akan membebani para debitur yang harus membayar beban pinjaman yang tinggi, sehingga hal ini akan berdampak pada kemungkinan terjadi risiko gagal bayar. Semakin naik nilai NIM maka NPF akan semakin naik juga.

Grafik 4.4
NIM (Net income margin)



Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan grafik 4.4 di atas menunjukkan pada tahun 2009-2011 NIM mengalami kenaikan sebesar 5,24% dan setelah itu turun pada tahun berikutnya dan pada tahun 2016 mencapai 2,48%. Berdasarkan aturan yang termuat pada ketetapan Bank Indonesia (BI) nomor 10/15/PBI/2008 bahwa rasio NIM yang sehat bagi suatu bank apabila diatas 6%. Jika nilai NIM menunjukkan biaya intermediasi yang dilakukan oleh bank sehingga NIM menjadi salah satu indikator dari efisiensi sistem perbankan. Bank perlu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga kualitas aktiva produktifnya tetap terjaga. Dengan kualitas pembiayaan yang bagus dapat

meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba bank (Nadi, 2016).

4. BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) (X4)

Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) yang menggunakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Auliani & Syaichu, 2016). Kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan beban hasil pada bank syariah lebih dikenal dengan bagi hasil (Purnamasari, 2016).

Tabel 4.5

**BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)
Bank Muamalat Indonesia**

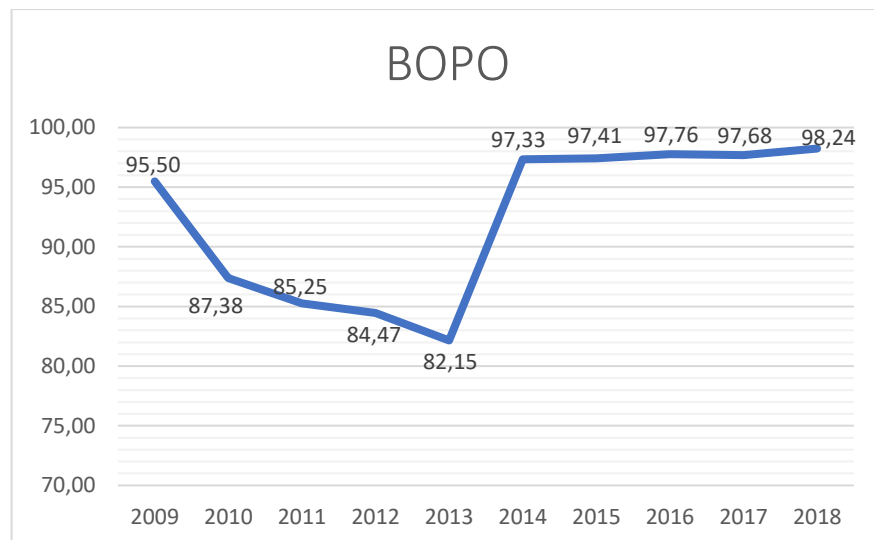
Kode	Tahun	BOPO
Bank Muamalat	2009	95,50
	2010	87,38
	2011	85,25
	2012	84,47
	2013	85,15
	2014	97,33
	2015	97,36
	2016	97,76
	2017	97,68
	2018	98,24

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) Bank Muamalat Indonesia rasio tertinggi didapat pada tahun 2018 mencapai 98,24% dan untuk rasio terendah BOPO (Biaya Operasional

Pendapatan Operasional) berada di kisaran tahun 2012. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank dan akhirnya akan menurunkan total aset bank yang bersangkutan (Dhiba & Esya, 2019). Berdasarkan aturan yang termuat pada ketetapan Bank Indonesia (BI) nomor 10/15/PBI/2008 bahwa rasio BOPO yang pada suatu dianggap sehat apabila dibawah 93% (Dedi Irawan et al), 2019).

Gambar 4.5
BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)
Bank Muamalat Indonesia



Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan grafik 4.5 BOPO pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2009 BOPO mengalami kenaikan sebesar 95,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2009 - 2013 mencapai kisaran 8%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional maka itu berarti biaya operasional yang dikeluarkan tidak efisien, sehingga dapat membuat bank tersebut berada dalam kondisi

bermasalah (Barus & Erick, 2016). Hal ini menyatakan bahwa semakin naik BOPO maka NPF akan semakin naik juga. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan operasional maka itu berarti biaya operasional yang dikeluarkan tidak efisien, sehingga dapat membuat bank tersebut berada dalam kondisi bermasalah. BOPO yang tinggi menunjukkan bank tidak mampu memperhitungkan besaran pendapatan yang diterima terhadap biaya yang dikeluarkan bank dalam periode tertentu (Indri, 2018).

5. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan (Rohawati, 2012). FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Indri, 2018).

Tabel 4.6
FDR (*Financing to deposit Ratio*)

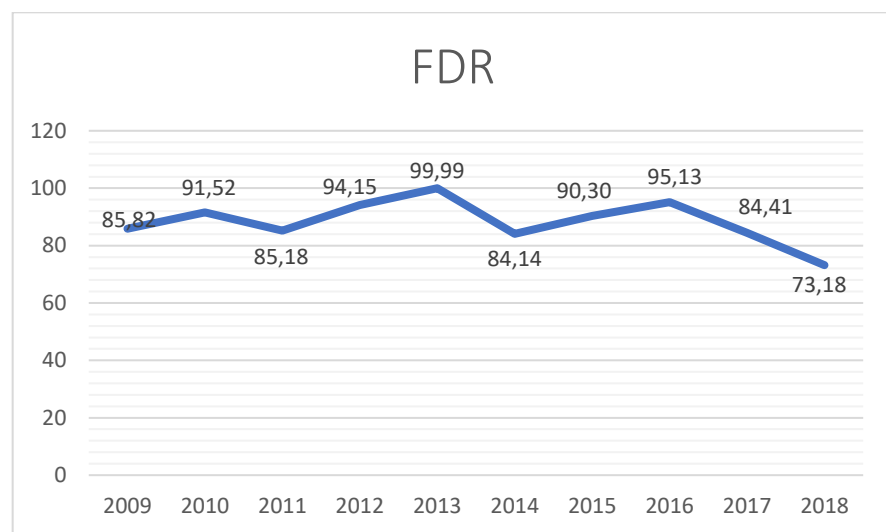
Kode	Tahun	FDR
Bank Muamalat	2009	85,82
	2010	91,52
	2011	85,12
	2012	94,15
	2013	99,99
	2014	84,14
	2015	90,30
	2016	95,13
	2017	84,41
	2018	73,18

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan dari tabel 4.6 FDR (*Financing to deposit ratio*) Bank Muamalat Indonesia tingkat tertinggi didapatkan pada tahun 2013 dan untuk

FDR terendah berada di kisaran 2018. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi rasio FDR maka akan semakin berisiko buat bank, namun semakin rendah rasio FDR mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi pada bank tidak berjalan dengan baik (Ardana, 2019).

Grafik 4.6
FDR (*Financing to deposit ratio*)



Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan dari Grafik 4.6 menunjukkan bahwa FDR Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan terus menerus pada tahun 2009 dan kenaikan cukup tinggi berada di tahun 2013. Berdasarkan aturan yang termuat dalam ketetapan Bank Indonesia (BI) nomor 18/14/PBI/2016 tentang perubahan keempat atas peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 15/15/PBI/2013 mengenai giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional dan syariah bahwa tingkat rasio LDR atau FDR yang sehat pada suatu bank apabila 80% sampai dengan 92% (Dedi Irawan et al, 2019). Tingkat FDR yang rendah menunjukkan manajemen bank syariah kurang mampu menyalurkan pembiayaan, tapi bila FDR tinggi mengindikasikan bank sedang mengalami kelebihan dana yang harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Indri, 2018).

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Deskriptif

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website www.bankmuamalat.co.id berupa data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2008 -2018. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari SBIS, Inflasi, NIM, BOPO, dan FDR terhadap NPF Bank Muamalat. Statistik deskriptif dari variabel sampel Bank Muamalat Indonesia yang selama periode 2008 sampai dengan tahun 2018 disajikan dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel - Variabel Penelitian

	NPF	SBIS	INFLASI	NIM	BOPO	FDR
Mean	0.028540	0.061364	0.071730	0.040040	0.923170	0.883820
Median	0.026650	0.063450	0.039100	0.043650	0.964150	0.880600
Maximum	0.048500	0.072800	0.307000	0.052400	0.982400	0.999900
Minimum	0.014000	0.043280	0.026400	0.022200	0.821500	0.731800
Std.Dev	0.012426	0.008957	0.084610	0.011165	0.066159	0.075186
Skewness	0.303288	0.689804	2.450718	-0.425645	-0.482829	0.441064
Kurtosis	1.633653	2.734338	7.414047	1.708171	1.411738	2.919759

Sumber : Hasil oleh data melalui eviews 8, 2020

Dari tabel 4.6 Statistik deskriptif bahwa variabel dependen NPF (*Non performing Financing*) memiliki mean atau rata-rata 0.028540 serta nilai standar deviasi sebesar 0.012426.

1. Variabel SBIS dalam pengujian statistik deskriptif memiliki nilai Mean atau nilai rata-rata 0.061364 serta standar deviasinya 0.008957. Jadi jika semakin tinggi tingkat bonus SBIS akan mengurangi pembiayaan bermasalah.
2. Variabel inflasi dalam pengujian statistik deskriptif memiliki mean atau nilai rata-rata 0.071730 serta standar deviasinya 0.084610. Jadi setiap kenaikan inflasi 1% akan berdampak pada penurunan NPF.

3. Variabel NIM dalam pengujian statistik deskriptif memiliki nilai mean atau nilai rata-rata 0.040040 serta standar deviasinya 0.011165. Jadi semakin tinggi nilai pada NIM maka NPF akan semakin naik .
4. Variabel BOPO dalam pengujian statistik deskriptif memiliki nilai mean atau nilai rata-rata 0.923170 serta standar deviasinya 0.66159. Jadi semakin naik nilai pada BOPO maka NPF akan cenderung meningkat, hal ini terjadi karena apabila biaya operasional lebih tinggi dari pada pendapatan operasional maka itu berarti biaya operasional yang dikeluarkan tidak efisien.
5. Variabel FDR dalam pengujian statistik deskriptif memiliki nilai mean atau nilai rata-rata 0.883820 serta standar deviasinya 0.075186. Jadi semakin tinggi nilai pada FDR tidak di dukung dengan *loanreview* dan pengawasan yang lebih baik yang akan menyebabkan naiknya tingkat NPF.

4.4 Hasil Uji Prasyarat

4.4.1 Uji Asumsi Klasik

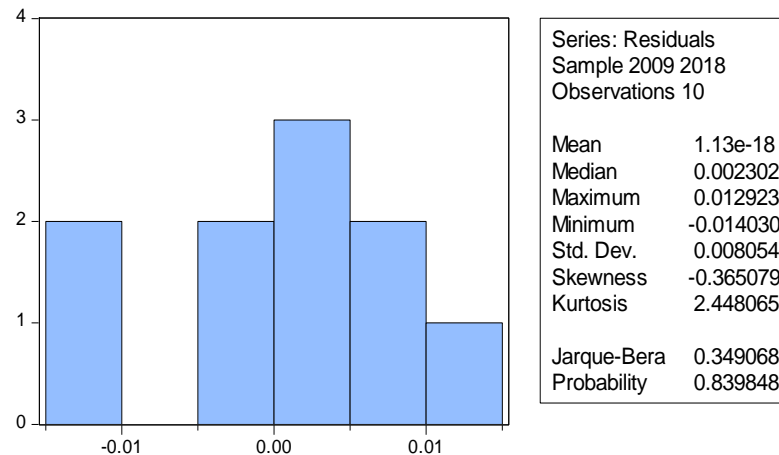
Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui, bahwa uji t mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali, 165). Penelitian ini menggunakan uji JB (*Jarque-Bera*) dengan tingkat signifikan 0,05. Dasar pengambilan keputusan JB (*Jarque-Bera*), yaitu:

- a. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal
- b. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Grafik 4.6 Uji Normalitas



Hasil yang diperoleh berdasarkan nilai Jarque-Bera sebesar 0.349068 dan nilai probability sebesar 0.839848. Nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari taraf signifikan ($0.349068 > 0,05$), artinya tidak menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi (Pranyoto, 2019).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi dengan *ordinary least square* (OLS) akan BLUE (*best Linear unbiased Estimator*) jadi dapat disimpulkan meskipun terjadi multikolinieritas tinggi antar variabel independen, OLS estimator tetap BLUE. Pengaruh dari multikolinieritas hanyalah sulit untuk mendapatkan koefisien dengan standard error yang kecil (Imam Ghazali, 77-78). *Tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) pada multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF), kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan *VIF* > 10 .

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas**Coefficients**

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.037680	2581.851	NA
SBIS	0.553363	145.5155	2.737860
INFLASI	0.005818	4.619863	2.568627
NIM	0.811006	95.32616	6.234955
BOPO	0.024686	1448.227	6.663301
FDR	0.007325	394.6006	2.553456

Sumber: Data diolah (Hasil Output Eviews 8).

Hasil uji multikolinelitas dapat dilihat dari tabel VIP karena nilai VIP dari kedua variable tidak ada yang lebih besar dari 10. VIF berkisar antara 2.553456 sampai 6.663301, yang berarti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoleniaritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam mendeteksi adanya autokorelasi dengan uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk auto korelasi tingkat 1 (*First Order autorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas.

Tabel 4.9**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.162531	Mean dependent var	1.13E-18
Adjusted R-squared	-2.768610	S.D dependent var	0.008054
S.E of regression	0.015635	Akaike info criterion	-5.488093
Sum squared resid	0.000489	Schwarz criterion	-5.246025
Log likelihood	35.44047	Hannan-Quinn criter	-5.753641
F-statistic	0.055450	Durbin-Watson stat	2.145058

Sumber: Data diolah (Hasil Output Eviews 8)

Hasil output menunjukkan bahwa nilai durbin-watson DW sebesar 2.145056 akan dibandingkan dengan nilai-nilai tabel DW dengan menggunakan level signifikan 5%. Maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Pada jenis data *crosssection* biasanya kita berhubungan dengan anggota populasi pada satu waktu tertentu. Heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator (koefisien variabel independen) menjadi bias karena residual bukan komponen menghitungnya. Namun menyebabkan estimator jadi tidak efisien dan BLUE lagi serta *standard error* dari model regresi menjadi bias sehingga menyebabkan nilai t statistic dan f hitung bias (*misleading*). Dampak yang ditimbulkan adalah pengambilan kesimpulan statistic untuk pengujian hipotesis menjadi tidak valid.

Tabel 4.10
Heterokedasitas

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000893	0.001304	0.684886	0.5310
SBIS	0.007419	0.004995	1.485147	0.2117
INFLASI	-0.000528	0.000512	-1.031109	0.3608
NIM	-0.008129	0.006047	-1.344164	0.2501
BOPO	-0.000986	0.001055	-0.934999	0.4027
FDR	-1.76E-05	0.000575	-0.030642	0.9770

Sumber: Data diolah (Hasil Output Eviews 8).

Hasil pada output menunjukkan bahwa semua variabel diatas memiliki nilai probabilitas diatas 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat heteroskesdastisitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uji Glejser mengindikasikan tidak adanya heteroskesdastisitas dalam model ini.

4.5 Metode Analisis Regresi

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan alpha sebesar 0,05. Adapun hasil analisis regresi linier berganda menggunakan Eviews 8 tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients

Variable	Coefficient	Std.Eror	t-Statistic	Prob.
C	-0.081263	0.194113	0.418637	0.6970
SBIS	0.290463	0.743884	0.390468	0.7161
INFLASI	-0.012689	0.076277	-0.166355	0.8759
BOPO	0.121728	0.157117	0.774762	0.4817
FDR	-0.049936	0.085584	0.583469	0.5909
R-squared	0.579918	Mean dependen var		0.028540
Asjusted R-squared	0.054816	S.D dependen var		0.012426
S.E. of regression	0.012081	Akaike info criterion		-5.710722

Sumber: Data diolah, 2020

$$\begin{aligned} \text{NPF} = & -0.081263 + 0.290463 \text{ SBIS} - 0.012689 \text{ INFLASI} \\ & + 0.615565 \text{ NIM} + 0.121728 \text{ BOPO} - 0.049936 \text{ FDR} \\ & + e \end{aligned}$$

Keterangan :

NPF : *Non Performing Financing*

β_0 : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$: Koefisien regresi

SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah

INF : Inflasi

NIM : *Net Income Margin*

BOPO : Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional

FDR : *Financing to Deposit Ratio*

Berdasarkan persamaan diatas disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar -0.081263 artinya bahwa variabel SBIS, Inflasi, NIM, BOPO, FDR akan menurunkan tingkat NPF sebesar -0.081263 .
2. Nilai koefisien SBIS variabel X_1 sebesar 0.290463 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan SBIS sebesar 1 satuan maka variabel NPF akan naik sebesar 0.290463 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien Inflasi variabel X_2 sebesar -0.012689 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penurunan sebesar 1 satuan maka variabel NPF akan turun sebesar -0.012689 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Nilai koefisien NIM variabel X_3 sebesar 0.615565 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel NPF akan naik sebesar 0.615565 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Nilai koefisien BOPO variabel X_4 sebesar 0.121728 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel NPF akan naik sebesar 0.121728 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
6. Nilai koefisien FDR variabel X_5 sebesar -0.049936 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penurunan sebesar 1 satuan maka variabel NPF akan turun sebesar -0.049936 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi R^2

Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12 R - square

Model Summary	
R-squared	0.579918
Adjusted R-squared	0.054816
S.E of regression	0.012081

Sumber : Data diolah,2020

Tampilan pada output eviews menunjukkan besaran Adjusted R^2 sebesar 0.054816, hal ini menandakan 0,05% tingkat NPF dapat dijelaskan oleh variasi lima independen yaitu SBIS, Inflasi, NIM, BOPO, dan FDR. Sedangkan sisanya 99,95% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel. *Standar error of estimate (Se of regression)* sebesar 0.012081 semakin kecil nilai SSE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.6.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan pada tingkat kepercayaan sebesar 10% untuk menjawab hipotesis yang disampaikan dalam penelitian. Adapun kesimpulan jika:

- Ha diterima dan H0 ditolak apabila $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} atau $Sig < 0,05$
- Ha diterima dan H0 ditolak apabila $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} atau $Sig > 0,05$

Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4. Sebagai berikut:

- Hipotesis pertama (H_{a1}) dalam penelitian ini adalah SBIS Berdasarkan nilai uji statistik t atas variabel SBIS dengan nilai koefisien beta sebesar 0.290463 dan nilai t hitung sebesar 0.390468 dengan nilai probabilitas lebih sebesar (0.7161) 71,61% lebih besar

- dibandingkan nilai alpha yaitu (0,05) 5%. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a1} ditolak dan menerima H_{o1} yang menyatakan SBIS tidak berpengaruh terhadap NPF.
2. Hipotesis H_{a2} pada nilai uji statistik t atas variabel Inflasi dengan nilai koefisien beta sebesar -0.012689 dengan nilai t hitung sebesar -0.166355 dengan nilai probabilitas (0.8759) 87,59% lebih besar dibandingkan nilai alpha yaitu (0,05) 5%. Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a2} ditolak dan menerima H_{o2} yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.
 3. Hipotesis H_{a3} pada nilai uji statistik t atas variabel NIM dengan nilai koefisien beta sebesar 0.615565 dengan nilai t hitung sebesar 0.683537 dengan nilai probabilitas (0.5318) 53,18% > (0,05) 5%. Lebih besar dari nilai alpha (0,05) maka jawaban hipotesis yaitu H_{a3} ditolak dan menerima H_{o3} yang menyatakan NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.
 4. Hipotesis H_{a4} pada nilai uji statistik t atas variabel BOPO dengan nilai koefisien beta sebesar 0.121728 dengan nilai t hitung sebesar 0.774762 dengan nilai probabilitas (0.4817) 48.17% > (0,05) 5%. Lebih besar dari nilai alpha (0,05). Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a4} ditolak dan menerima H_{o4} yang menyatakan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.
 5. Hipotesis H_{a5} pada nilai uji statistik t atas FDR dengan nilai koefisien beta sebesar -0.049936 dengan nilai t hitung sebesar -0.583469 dengan nilai probabilitas (0.5909) 59,09% > (0,05) 5%. Lebih besar dari nilai alpha (0,05). Maka jawaban hipotesis yaitu H_{a5} ditolak dan menerima H_{o5} yang menyatakan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) terhadap NPF

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Eviews 8 menunjukkan bahwa SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas (0,7161%) $0.7161 > (0.05) 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan SBIS tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF.

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SBIS (Fatahiya, 2015). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah namun menggunakan prinsip bagi hasil. Likuiditas memiliki risiko, yaitu ketika terlalu tinggi, maka akan terdapat dana idle sehingga mengurangi kesempatan Bank untuk mendapatkan laba dari penyaluran dana, serta apabila terlalu kecil maka bank tidak mampu mencukupi kewajiban jangka pendek serta akan mendapatkan penalti dari Bank Indonesia. Risiko likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatkan asetnya dengan biaya relatif murah dan tanpa adanya kerugian berarti yang diderita.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian (Wulan, 2018) sebelumnya yang menunjukkan bahwa SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Pada penelitian SBIS tidak terlalu memberi dampak yang signifikan pada internal perusahaan yaitu NPF Bank Muamalat Indonesia. Tidak berpengaruhnya SBIS terhadap NPF pada penelitian ini dikarenakan,

peningkatan SBIS rate membawa insentif bagi Bank Muamalat Indonesia untuk menanamkan dananya dalam bentuk investasi dibanding melakukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan penanaman dana dalam bentuk SBIS memberikan tingkat risiko yang rendah dari pada risiko pembiayaan, sehingga pembiayaan akan turun dan risiko gagal bayar juga turun. Apabila semakin tinggi tingkat bonus SBIS, akan mengurangi pembiayaan bermasalah bank syariah (NPF). Meningkatnya SBIS menyebabkan peningkatan pada suku bunga kredit bank sehingga mengakibatkan keinginan masyarakat dalam meminjam dana akan berkurang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

4.7.2 Pengaruh Inflasi terhadap NPF

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Eviews 8 menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas (0,8759%) $0.8759 > (0.05) 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan Inflasi tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF.

Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli dan risiko inflasi kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Sehingga apabila bank syariah hendak memberikan pembiayaan maka sebaiknya sumber dananya diperoleh dari modal dan sumber dana jangka panjang. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, maka pelunasan pembiayaan dengan menggunakan arus

kas nasabah menjadi tidak lancar yang artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu bank akan tetap stabil.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian (Wulan, 2018) sebelumnya yang menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Inflasi dikatakan normal dibatas 4% dan pada penelitian inflasi di Indonesia terus mengalami penurunan hal ini disebabkan karena laju inflasi tidak terlalu memberi dampak yang signifikan pada internal perusahaan yaitu NPF Bank Muamalat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi pinjamannya ke bank, sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia tidak ikut mengalami kenaikan juga. Hal ini dikarenakan Bank Umum Syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah menggunakan beberapa macam akad yang lebih banyak dalam pembiayaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan. Saat terjadi kenaikan inflasi dalam jangka panjang, hal ini tidak mempengaruhi jumlah angsuran yang dibayar nasabah. Dikarenakan nasabah dapat merencanakan pengaturan *cash flow* yang dibutuhkan untuk melunasi pembiayaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

4.7.3 Pengaruh NIM (*Net income margin*) terhadap NPF

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Eviews 8 menunjukkan bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas (0,5318%) $0.5318n > (0.05) 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan SBIS tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF.

Salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, dengan demikian risiko pasar dapat diukur dengan suku bunga pendanaan (*funding*) dengan

suku bunga pinjaman diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut, selisih antara total biaya bunga pendapatan disebut *Net Income Margin* (NIM). NIM mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa NIM menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatanoperasional dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan (Aryani, 2016). Dan NIM penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku bunga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian (Aryani, 2016) sebelumnya yang menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. NIM dikatakan normal dibatas 6% dan pada penelitian ini NIM tidak terlalu memberi dampak yang signifikan pada internal perusahaan yaitu NPF Bank Muamalat Indonesia. Hal ini Mengindikasikan bahwa semakin tinggi NIM maka akan meningkatkan pembiayaan. Dalam hal ini dikarenakan penempatan aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan tidakalah cukup besar untuk membiayai kinerja perbankan dan adanya penekanan dalam biaya dana untuk memperoleh pendapatan bersih bank. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan operasional bank karena bunga tersebut diperoleh dari kegiatan utamanya dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan NIM sebagai penghasilan bunga bersih yang ditahan yang dijadikan sumber pendanaan bank dalam komponen permodalan. Bunga bersih ini dimasukan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank dan tingkat NIM yang tinggi masih diperlukan untuk menutup risiko inflasi seperti kerugian pada valas dan risiko kegiatan usaha di Indonesia,sehingga NIM juga difokuskan untuk menutupi risiko akibat inflasi dan tidak digunakan untuk pembiayaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

4.7.4 Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) terhadap NPF

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Eviews 8 menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas (0,4817%) $0.4817 > (0.05) 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan BOPO tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF.

BOPO adalah indikator kemampuan bank dalam melakukan efisiensi kegiatan operasionalnya. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugiannya terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. BOPO yang merupakan indikator efisiensi bank tidak lantas dapat mengurangi rasio pembiayaan bermasalah. Risiko operasional menekankan bahwa efisiensi dicapai bila transaksi dilakukan dengan biaya transaksi yang minimum.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian (Indri, 2018) sebelumnya yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. BOPO dikatakan normal dibatas 93% dan pada penelitian ini BOPO tidak terlalu memberi dampak yang signifikan pada internal perusahaan yaitu NPF Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan bermasalah adalah urusan eksternal bank yang berhubungan langsung dengan masyarakat peminjam dana dalam kelancaran membayar kewajibannya bukan tergantung pada efisiensi operasional perbankan syariah sehingga tingkat efisiensi bank bukan menjadi patokan

manajemen bank dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya BOPO tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia.

4.7.5 Pengaruh FDR (*Financing to deposit ratio*) terhadap NPF

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan Eviews 8 menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas (0,5909%) $0.5909 > (0.05) 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan FDR tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF. FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Indri, 2018). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan dana yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian dana kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang akan menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank (Auliani & Syaichu, 2016). Risiko likuiditas penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Risiko pada likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian (Aryani, 2016) sebelumnya yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan

terhadap NPF. FDR dikatakan normal dibatas 92% pada penelitian FDR terus mengalami penurunan hal ini disebabkan karena laju rasio FDR tidak terlalu memberi dampak yang signifikan pada internal perusahaan yaitu NPF Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola Bank Muamalat Indonesia sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban. Dan adanya kesepakatan di awal antara nasabah dan bank (akad) dan kesepakatan ini menjadikan nasabah beritikad baik yang menekankan pada amanah sehingga hanya sedikit faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Pada penelitian ini menunjukkan FDR tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia.